



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

Berita Resmi Statistik

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 Provinsi Kalimantan Tengah

01 Agustus 2019



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI merupakan usaha bersama sejak tahun 2009 antara:



Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM)



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)



Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)



Badan Pusat Statistik (BPS)






IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia



IDI adalah *Fact-Based Information*, bagian dari upaya mengembangkan *a culture of evidence-based decision making*, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008



Setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan

KOMPONEN IDI TERDIRI ATAS 3 ASPEK, 11 VARIABEL DAN 28 INDIKATOR

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Lembaga Demokrasi 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Dokumen

Berupa Perda, Pergub, Perbup,
Surat Edaran, dsb



Surat Kabar

- Satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas



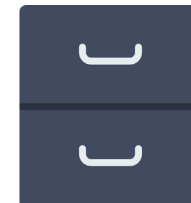
Focus Group Discussion (FGD)

Untuk mengkonfirmasi dan
menambah informasi dari
stakeholder



Wawancara Mendalam (WM)

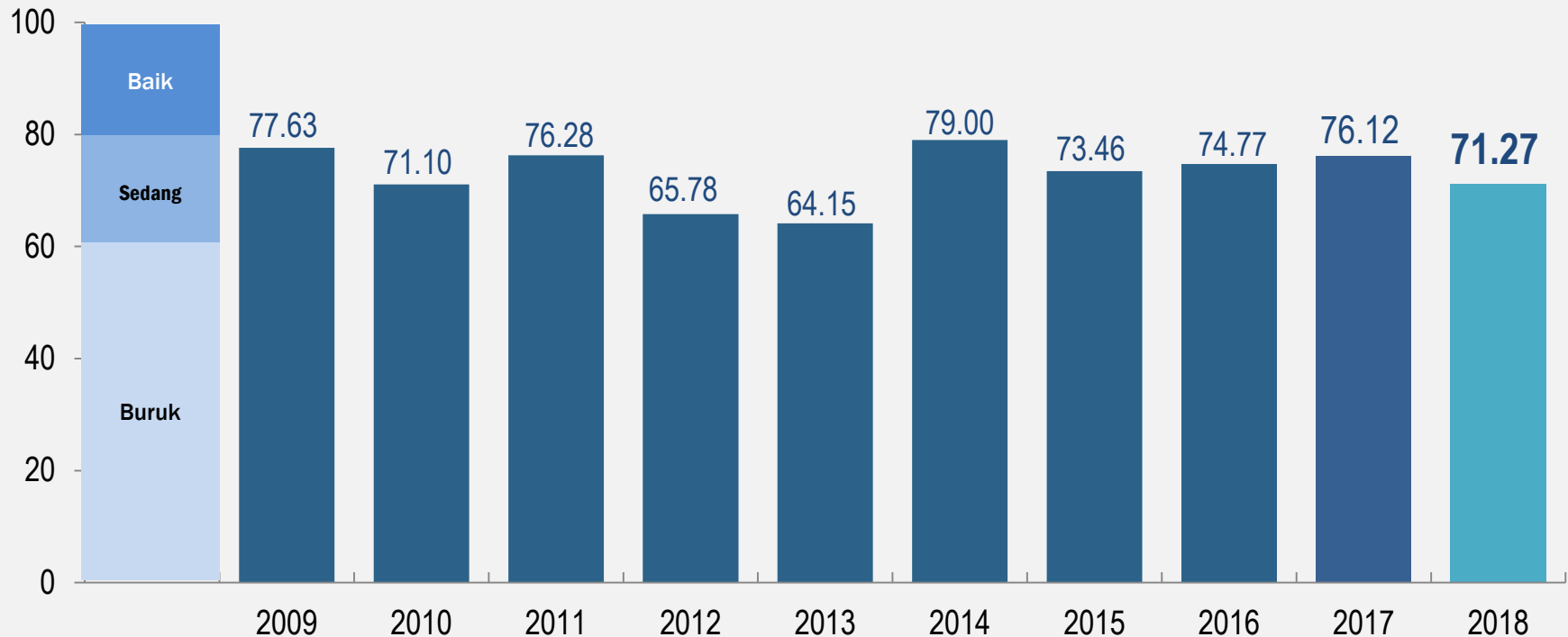
Untuk mengkonfirmasi dan
menambah informasi dari
narasumber/ahli





Perkembangan IDI Kalteng 2009-2018

Pelopori
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

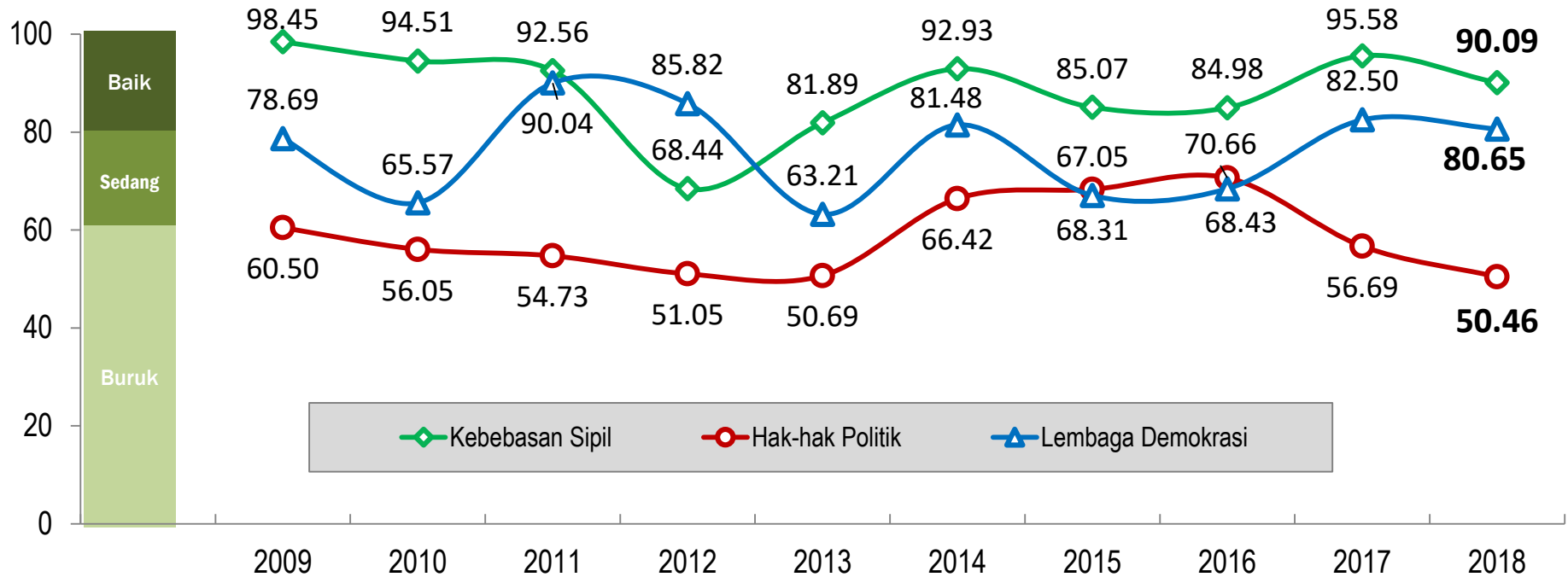


- ▶ Tahun 2018 IDI Kalteng mencapai **71,27**, atau mengalami penurunan 4,85 poin dibandingkan tahun 2017
- ▶ Dalam periode pengukuran 2009 – 2018, IDI Kalteng masih tergolong kategori ‘sedang’



Perkembangan Aspek IDI Kalteng

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua



- Tahun 2018 semua aspek demokrasi mengalami penurunan.
- Aspek Hak-hak Politik menjadi penyebab dominan menurunnya IDI di Kalteng
- Aspek Hak-hak Politik juga masih tergolong kategori “buruk”

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI KALTENG, 2017-2018

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

ASPEK		2017	2018	SELISIH (2018-2017)
 5,49  KEBEBASAN SIPIL	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	96,88	-3,13
	2. Kebebasan Berpendapat	100,00	77,77	-22,23
	3. Kebebasan Berkeyakinan	98,59	89,86	-2,57
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	93,05	-6,95
 6,23  HAK-HAK POLITIK	5. Hak Memilih dan Dipilih	78,09	76,67	-1,42
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	35,29	24,25	-11,04
 1,85  LEMBAGA DEMOKRASI	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	98,73	98,73	0,00
	8. Peran DPRD	51,76	52,77	1,01
	9. Peran Partai Politik	100,00	100,00	0,00
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	65,63	56,58	-9,05
	11. Peradilan yang Independen	100,00	100,00	0,00

Kenaikan



INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI KENAIKAN :

8

7

9

11

Tetap

Penurunan



INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI PENURUNAN:

1

2

3

4

5

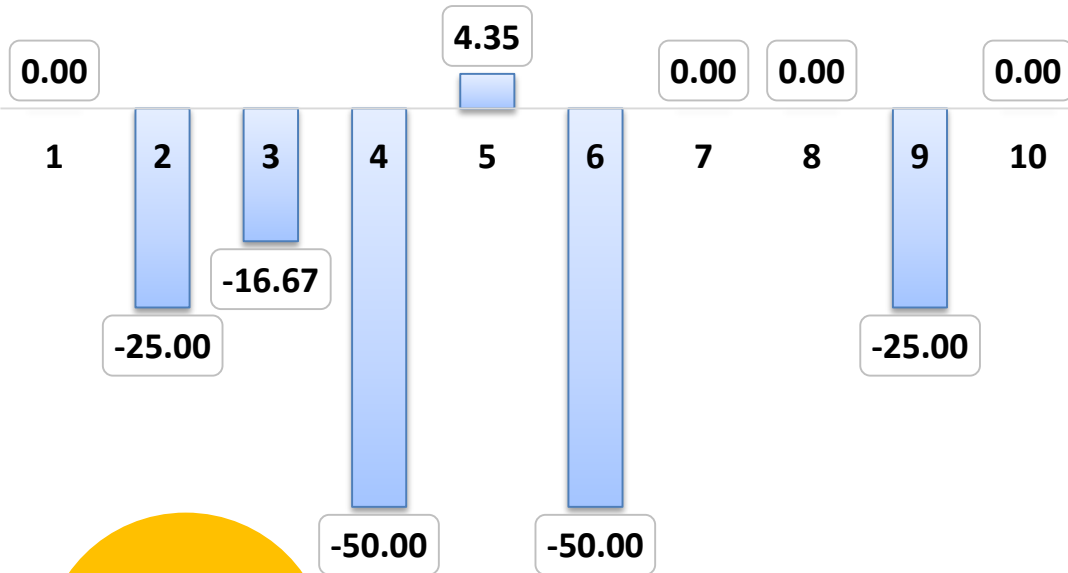
6

10

ASPEK KEBEBASAN SIPIL

TURUN 5,49 POIN DIBANDINGKAN TAHUN 2017

PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK KEBEBASAN SIPIL tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017



Kebebasan Sipil

- ❖ Hanya indikator 5 dalam Aspek Kebebasan Sipil yang mengalami peningkatan
- ❖ Indikator 2, 3, 4, 6 dan 9 mengalami penurunan dan penurunan terbesar pada indikator 4 dan 6 (50,00 poin).

NAMA INDIKATOR

- 1 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- 2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- 3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- 4 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- 5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
- 6 Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya
- 7 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
- 8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- 9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- 10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

ASPEK HAK-HAK POLITIK

TURUN 6,23 POIN DIBANDINGKAN TAHUN 2017

PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK HAK-HAK POLITIK

tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017



NAMA INDIKATOR

- 11** Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
- 12** Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
- 13** Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 14** Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
- 15** Persentase anggota perempuan DPRD provinsi
- 16** Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- 17** Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Keterangan:

*) Indikator 11-14 tidak mengalami perubahan karena terkait dengan pemilu



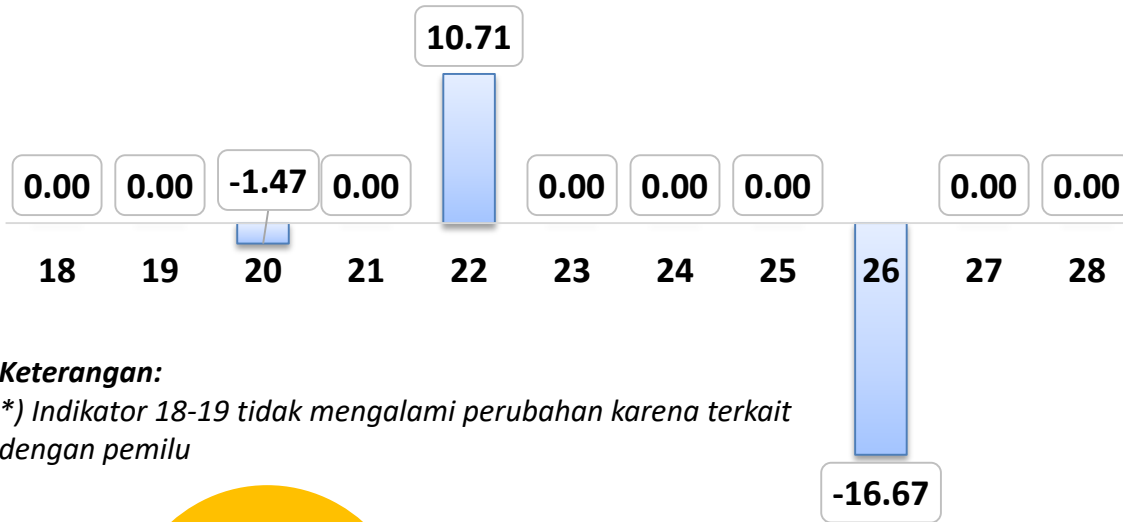
Hak-hak Politik

- ❖ Hanya **indikator 16**, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, yang mengalami peningkatan (1,09 poin)
- ❖ **Dua dari 7 indikator** mengalami penurunan dan penurunan **tertinggi** pada indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah (23,17 poin).

ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

TURUN 1,86 POIN DIBANDINGKAN TAHUN 2017

PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017



Keterangan:

*) Indikator 18-19 tidak mengalami perubahan karena terkait dengan pemilu



Lembaga Demokrasi

- ❖ Dalam aspek Lembaga Demokrasi hanya **indikator 22**, Rekomendasi DPRD ke Eksekutif, yang meningkat sebesar 10,71 poin.
- ❖ Alokasi anggaran wajib pendidikan dan Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah adalah **2 indikator** yang mengalami penurunan.

NAMA INDIKATOR

18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19	Kecurangan dalam penghitungan suara
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
24	Persentase perempuan pengurus partai politik
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
27	Keputusan hakim yang kontroversial
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Masih ada tujuh indikator yang berkategori buruk

Indikator 4
50,00

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

Indikator 6
37,50

Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya

Indikator 16
6,52

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

Indikator 17
41,97

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Indikator 21
0,00

Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD

Indikator 22
10,71

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Indikator 26
33,33

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah

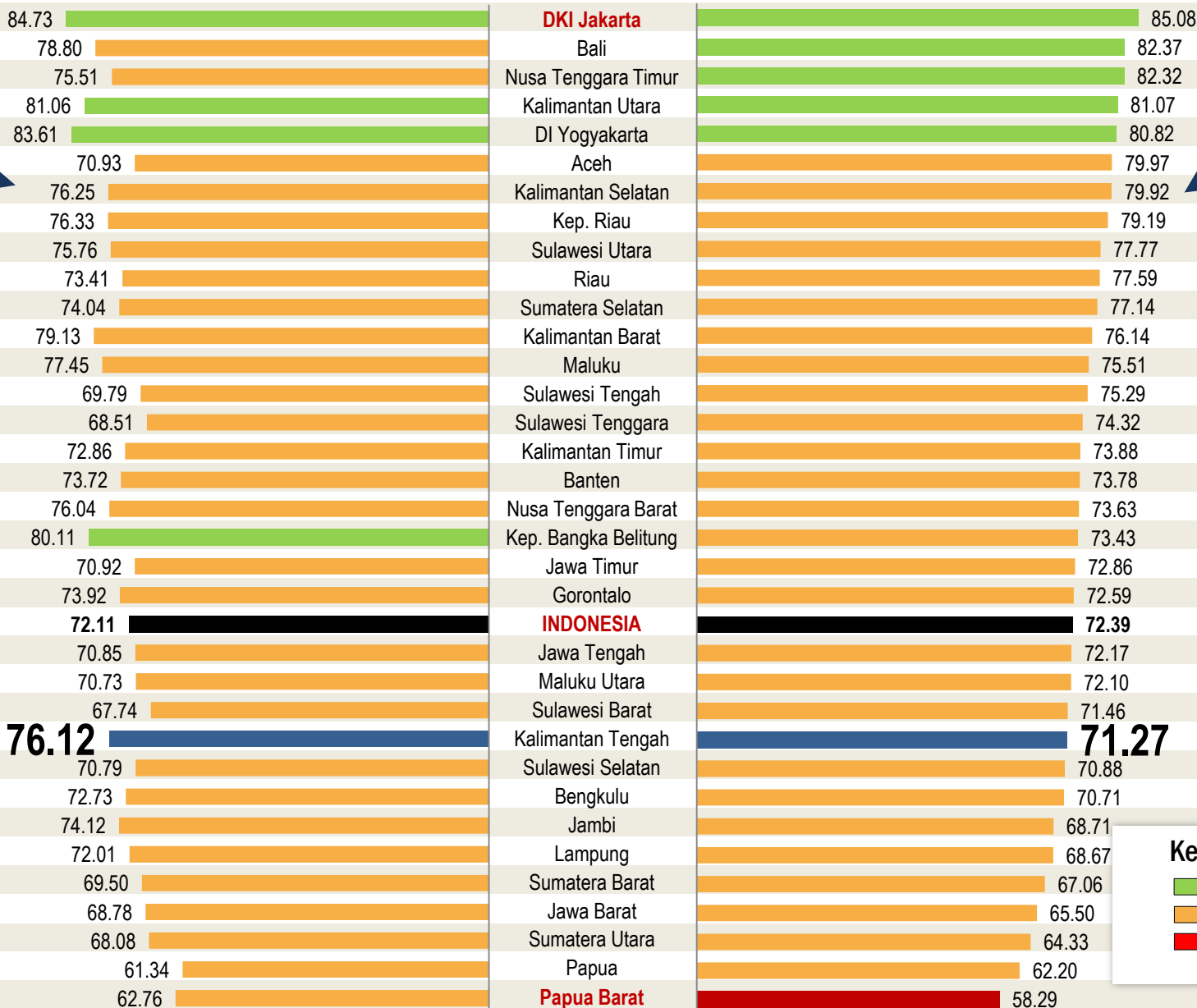


PERKEMBANGAN IDI PROVINSI 2017-2018

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

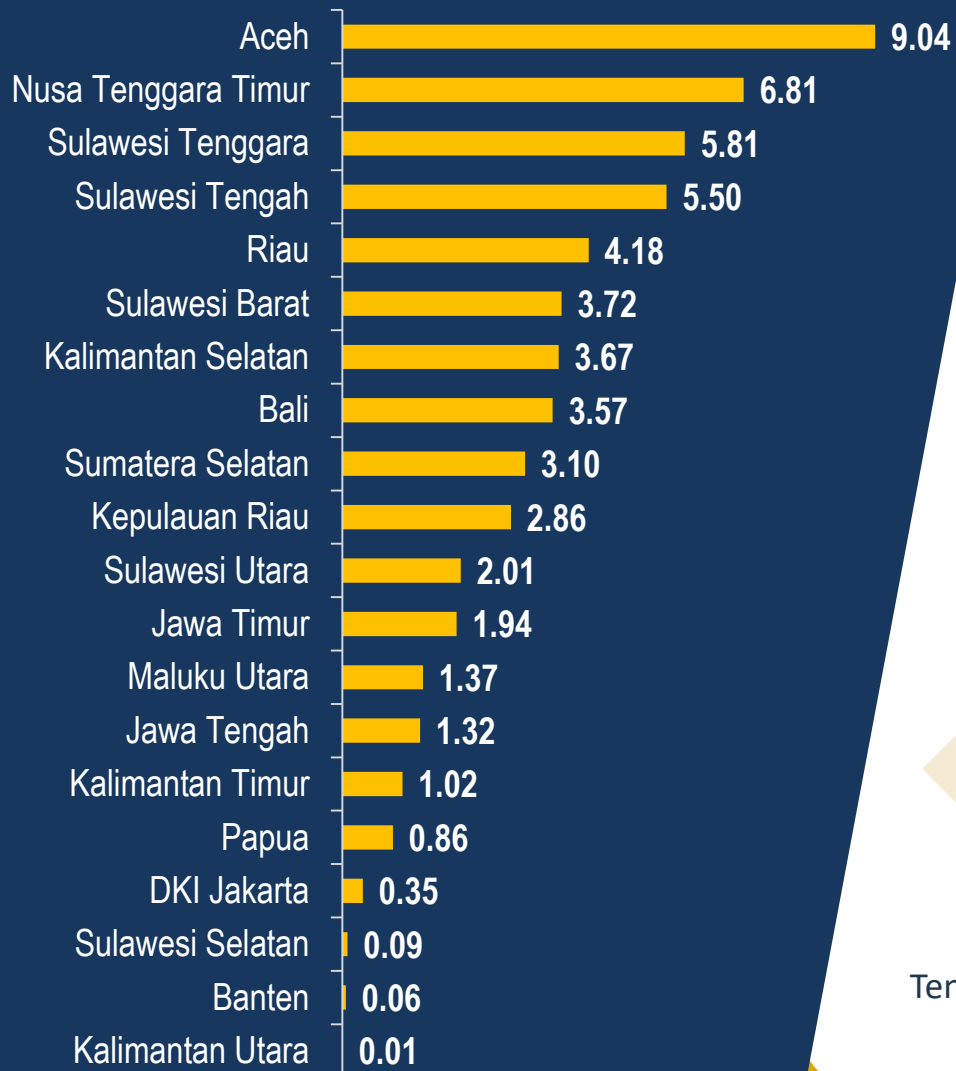
IDI
2017

IDI
2018



Keterangan:

- > 80 (Baik)
- 60 – 80 (Sedang)
- < 60 (Buruk)



Nilai IDI di **20 provinsi** mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017

Peningkatan IDI Aceh terutama dipengaruhi **Aspek Lembaga Demokrasi**

 **16,20** poin



Aceh

Peningkatan IDI Nusa Tenggara Timur terutama dipengaruhi **Aspek Kebebasan Sipil**

 **14,31** poin



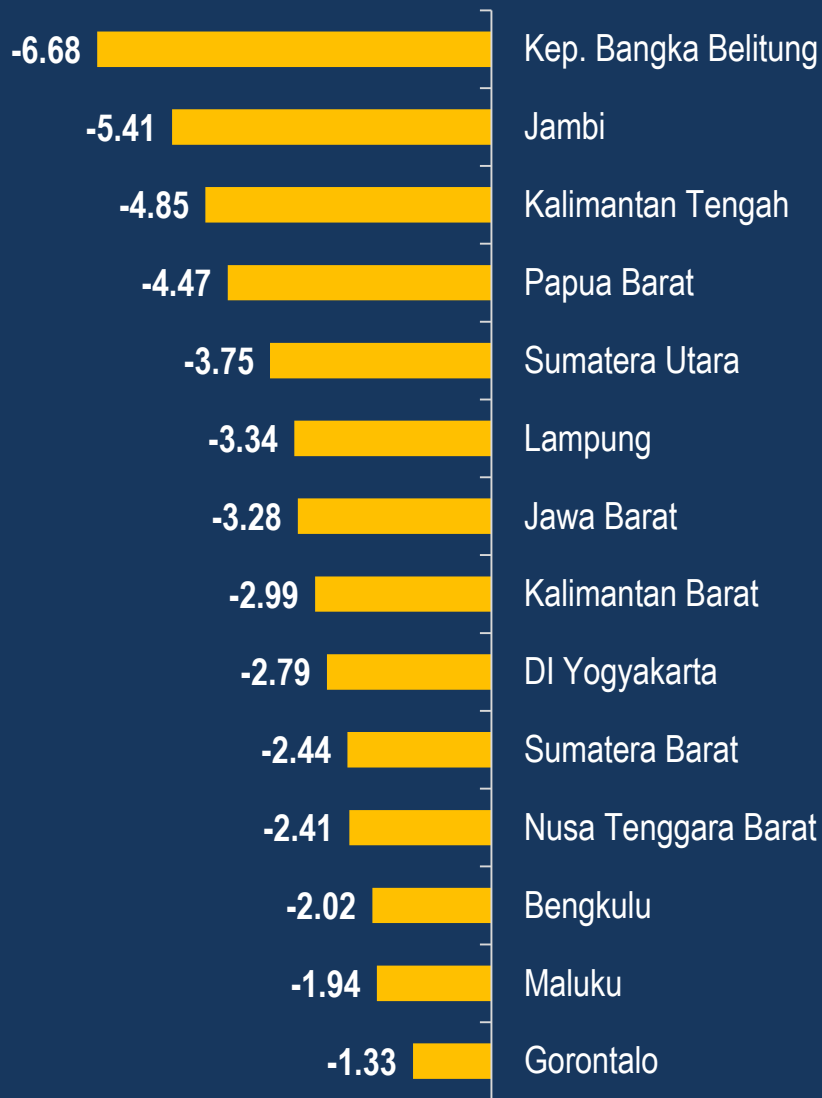
Nusa Tenggara Timur

Peningkatan IDI Sulawesi Tenggara terutama dipengaruhi **Aspek Lembaga Demokrasi**

 **8,42** poin



Sulawesi Tenggara



Nilai IDI di **14 provinsi** mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017

Penurunan IDI Kep. Bangka Belitung terutama dipengaruhi **Aspek Lembaga Demokrasi**

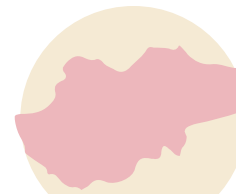


9,13 poin



Kep. Bangka Belitung

Penurunan IDI Jambi terutama dipengaruhi **Aspek Kebebasan Sipil**



Jambi

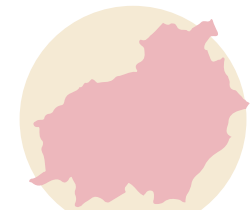


13,93 poin

Penurunan IDI Kalimantan Tengah terutama dipengaruhi **Aspek Hak-hak Politik**



6,23 poin



Kalimantan Tengah

1

Angka IDI 2018 sebesar 71,27, turun 4,85 poin dibandingkan tahun 2017 didorong karena penurunan aspek kebebasan sipil (-5,49 poin), aspek hak-hak politik (-6,23 poin), dan aspek lembaga demokrasi (-1,86 poin).

2

Penurunan pada aspek kebebasan sipil disebabkan adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dan Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya

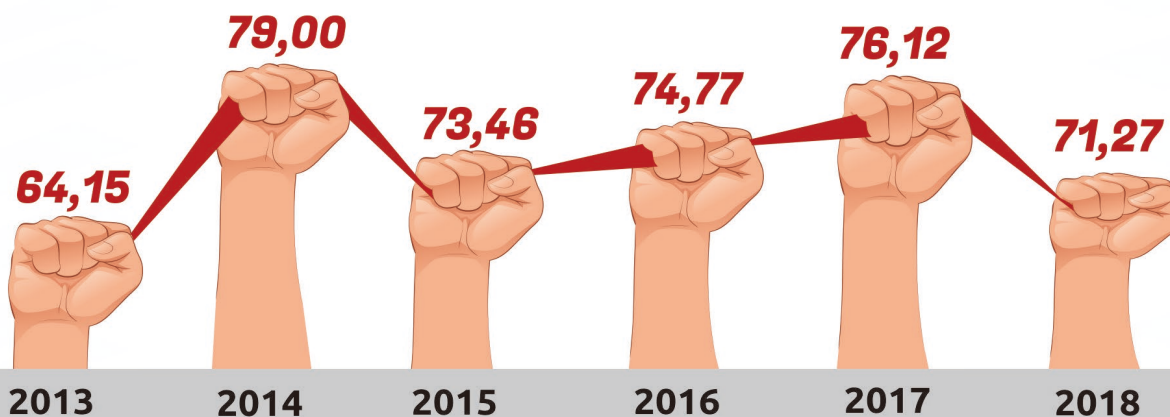
3

Penurunan aspek hak-hak politik terjadi karena menurunnya persentase anggota perempuan pada DPRD provinsi dan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

4

Penurunan aspek lembaga demokrasi terutama terjadi karena turunnya alokasi anggaran pendidikan wajib dan kurangnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

INDEKS DEMOKRASI KALIMANTAN TENGAH 2018



Perkembangan Variabel IDI 2017-2018

- ↓ Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
- ↓ Kebebasan Berpendapat
- ↓ Kebebasan Berkeyakinan
- ↓ Kebebasan dari Diskriminasi
- ↓ Hak Memilih dan Dipilih
- ↓ Partisipasi Politik
- ↔ Pemilu yang Bebas dan Adil
- ↑ Peran DPRD
- ↔ Peran Partai Politik
- ↓ Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
- ↔ Peran Peradilan yang Independen



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TERIMA KASIH

kalteng.bps.go.id



Jl. Kapten P. Tendean No 6



(0536) 3228105, 3235669



(0536) 3221380



pst6200@bps.go.id



BPS Kalimantan Tengah (Page)



[bps_kalteng](https://www.instagram.com/bps_kalteng)